

Rumusan Forum Konsultasi Publik (FKP) STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BBRMP SULAWESI TENGGARA

Kegiatan Forum Konsultasi Publik BBRMP Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 di aula BBRMP Sultra dan dibuka oleh Kepala BBRMP Sultra. Acara ini menghadirkan narasumber utama yaitu: Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra dan turut dihadiri sejumlah mitra stakeholder dan pemangku kepentingan antara lain Kepala Dinas Tanaman Pangan Peternakan Provinsi Sultra, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sultra, Dekan Fakultas Pertanian UHO dan jajaran mewakili akademisi, perwakilan SMK, perwakilan Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani, Pimpinan media Sultra.satu.com mewakili lembaga media, pimpinan perusahaan bergerak di bidang pertanian, dan perwakilan LSM serta kalangan internal BBRMP Sultra. Berikut ini disampaikan beberapa butir rumusan FKP:

1. Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan dari era BPTP menjadi BSIP dan saat ini menjadi BBRMP Sultra berimplikasi pula pada perubahan tugas dan fungsi (TUSI) lembaga. Adapun tugas barunya berdasarkan Permentan Nomor 39 Tahun 2025 adalah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
2. Posisi BBRMP Sultra sebagai UPT BRMP Kementerian Pertanian menjadi semakin strategis mengingat perannya dalam memastikan semua program Kementerian Pertanian bisa berjalan secara maksimal di wilayah ini dan menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan.
3. Dalam kapasitasnya sebagai Badan Publik, sebagaimana diamanahkan di dalam UU KIP nomor 14 tahun 2008, maka BBRMP Sultra wajib menyediakan layanan yang tidak hanya akurat, benar dan tidak menyesatkan, tetapi juga mudah

diakses bagi semua kalangan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pada point, izinkan kami mengutip Quote penutup dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, bahwa: "Pelayanan Publik yang berkualitas tidak lahir hanya dari regulasi atau teknologi, tetapi dari adanya komitmen untuk terus memperbaiki diri. Ketika setiap masukan bisa menjadi bahan evaluasi, ketika setiap pengaduan bisa segera ditindaklanjuti, dan apabila setiap layanan diberikan dengan penuh integritas, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Dan kepercayaan itulah sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik."

4. Berkaitan dengan hal tersebut, maka lembaga ini wajib menyusun standar pelayanan publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tantangan pelayanan public di era saat ini antara lain: (a). Meningkatnya ekspektasi dari pengguna layanan; (b). Tuntutan layanan yang cepat namun sederhana; (c). Terus berkembangnya kemajuan teknologi berbasis digital; (d). Tuntutan perlunya transparansi dan akuntabilitas; (e). Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengawal pelayanan publik.
6. Guna merespon tantangan tersebut, maka BBRMP Sultra senantiasa menghadirkan pelayanan seperti yang sudah berjalan sampai saat ini yaitu: (a). Layanan jasa pendampingan, penerapan dan diseminasi teknologi pertanian spesifik Lokasi (antara lain: konsultasi/narasumber, bimtek, kunjungan agroedukasi, dan perpustakaan); (b). Layanan benih/bibit sumber; (c). Layanan bagi milenial pertanian untuk bisa magang/PKL dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Dimana kesemua jenis layanan tersebut memiliki alur dan prosedur layanan yang jelas serta ditunjang sarana dan fasilitas pendukung yang memadai seperti: ruang tunggu nyaman (free

WIFI & *charging box*), fasilitas ramah disabilitas (roda dan jalur akses), ruang laktasi, *kid corners*, fasilitas ibadah dan fasilitas parkir luas bagi pengguna layanan.

7. Terkait tantangan wilayah penugasan yang begitu luas, mulai dari wilayah daratan hingga wilayah kepulauan serta tuntutan kecepatan layanan dari mitra stakeholder, maka bertepatan perayaan HUT RI ke 81 tahun dan menyongsong usia satu (1) tahun BBRMP Sultra, maka telah dihadirkan layanan digital dengan akronim: "**GAS PiMoLuLo**" yang diambil salah satu akar budaya di wilayah ini dan merupakan singkatan dari **Gerbang Aplikasi Sistem Pertanian Modern dan Lengkap untuk Layanan Optimal**. Layanan digital ini berisi tujuh (7) fitur unggulan yaitu: (a). Go Pertanian Modern, (b). perbenihan/pembibitan, (c). Ayo ke Perpustakaan, (d). *Show Widows* IP2MP, (e). Ayo ke Taman Agro Modern (TAM) dan (f). Magang/PKL Agro Milenial dan (g). Layanan Narasumber.
8. Layanan digital ini merupakan terobosan inovasi terbaru yang akan diusung BBRMP Sultra pada lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup Kementerian Pertanian yang akan diselenggarakan akhir Agustus 2026 dan sekaligus sebagai strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era modernisasi pertanian.
9. Pada kesempatan ini kami mendengarkan beberapa harapan dan masukan dari mitra stakeholder dan pemangku kebijakan yang mengemuka pada kegiatan FKP ini: (a). BKHIT Sultra menyampaikan penting soft skill, kompetensi SDM pengelola layanan dan pengawasan/evaluasi standar pelayanan; (b). Pihak BPSBTPH mengharapkan kerjasama yang lebih massive lagi terkait pendampingan usulan pelepasan & pengembangan varietas lokal; (d). pihak SMKN 4 Konawe & SMKN 4 Konsel mengharapkan kerjasama dan dukungan BBRMP Sultra dalam peningkatan kompetensi dan dukungan diseminasi pemberdayaan lahan demplot area sekolah bagi siswa dan alumni prakerin; (e.). Pihak Penyuluh pertanian CWS Sultra mengharapkan pentingnya percontohan PM AAS pada Lokasi

selain demfarm Koltim & pentingnya pengawasan terkait peredaran benih tanaman yang diakses via online; (f). Dekan Faperta UHO mengharapkan adanya divisi yang mengawal penerapan pertanian modern dan perlu adanya kajian kelembagaan dalam implementasi modernisasi pertanian, serta perlu prioritas komoditas strategis yang perlu didorong melalui pertanian modern;

10. Sebagai penutup bahwa dengan berakhirnya kegiatan FKP pada siang hari ini, maka bisa diperoleh kesepahaman bahwa penyelenggaraan pelayanan publik BBRMP Sultra harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Masukan dari mitra stakeholder dan pemangku kepentingan akan menjadi bahan dalam penyempurnaan dokumen SPP sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan dan meningkatkan kualitas serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Demikian rumusan dari kegiatan FKP disampaikan untuk diketahui oleh semua pihak terkait dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 18 Agustus 2026

Tim Perumus:

1. Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
2. Muhammad Adlan Larisu, S.H, S.P, M.Si